



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KOMISI I DPR RI
MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING COOPERATION IN THE
FIELD OF DEFENCE*)
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI**

TANGGAL 6 DESEMBER 2022

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
Yth. Saudara Menteri Pertahanan;
Yth. Saudara Menteri Luar Negeri atau yang mewakili;
Yth. Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili;
Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan; dan
Hadirin sekalian yang kami muliakan.**

Assalammu 'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mendengarkan Laporan Komisi I DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Fiji concerning Cooperation in the Field of Defence*)

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Perkenankanlah saya mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tersebut di atas.

Dapat kami sampaikan bahwa Presiden RI melalui surat Presiden RI Nomor: R-61/Pres/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, di dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri

Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas RUU tersebut.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI tanggal 3 Februari 2022 yang telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan bersama-sama dengan Pemerintah, maka Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 15 Maret 2022 memutuskan untuk melaksanakan pembahasan terhadap RUU tersebut.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Dalam proses persiapan pembahasan terhadap RUU tersebut di atas, Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan Pakar/Akademisi dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tersebut. Selanjutnya Komisi I DPR RI telah melaksanakan Pembicaraan Tingkat I dalam Raker dengan Pemerintah (Menhan, Menlu yang diwakili oleh Dirjen Aspasaf Kemlu, dan Menkumham yang diwakili oleh Wamenkumham) pada tanggal 28 November 2022 untuk membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan.

Pembahasan Pembicaraan Tingkat I tersebut di atas berlangsung secara kritis, mendalam, dan terbuka. Akhirnya Fraksi-Fraksi di Komisi I DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan untuk selanjutnya dibahas dalam Pembicaraan Tingkat II dalam rangka Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, aspek pertahanan secara signifikan menentukan posisi tawar suatu negara dalam tatanan hubungan antar-negara dan politik internasional. Oleh karena itu, aspek pertahanan negara mesti dianggap sebagai prasyarat bagi suatu negara untuk menangkal segala ancaman yang membahayakan suatu negara.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk kerja sama dalam bidang pertahanan.

Kerja sama antar-negara dalam bidang pertahanan tidak hanya ditujukan untuk meminimalisir potensi ancaman yang ada namun juga ditujukan guna meningkatkan kemampuan industri pertahanan sebuah negara. Melalui kerja sama dengan negara yang memiliki kemampuan pertahanan yang sudah diakui, sebuah negara dapat belajar dan menyerap pengetahuan dan teknologi terkait pertahanan yang sudah terlebih dahulu dimiliki oleh negara lainnya melalui skema transfer teknologi.

Selain itu, politik luar negeri Indonesia dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes. Wujud dari diplomasi pertahanan adalah terjalannya kerja sama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat, salah satunya dengan Pemerintah Republik Fiji.

Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Pertahanan memiliki nilai strategis karena untuk meningkatkan kerja sama pertahanan kedua negara serta penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan nasional masing-masing negara dengan didasarkan prinsip kesetaraan, saling percaya, dan pengertian.

Komisi I DPR RI berharap dengan disetujuinya RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan menjadi Undang-Undang dapat mendukung peningkatan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah kedua negara.

Melalui persetujuan ini terdapat keinginan kita untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia dapat terealisasi. Di samping itu, kami mengharapkan kerja sama di bidang pertahanan ini dapat menjaga hubungan baik Indonesia-Fiji sehingga diharapkan dapat mendorong peran penting Fiji di kawasan Pasifik Selatan yang secara konsisten telah menunjukkan dukungannya terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Demikian Laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan. Selanjutnya, Komisi I DPR RI mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI hari ini terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan menjadi Undang-Undang.

Mengakhiri Laporan Komisi I DPR RI hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para Anggota Dewan yang terhormat yang telah mempercayakan Komisi I DPR RI untuk melaksanakan tugas pembahasan terhadap RUU tersebut di atas. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para Anggota Komisi I DPR RI dan kepada Tim Interdep Pemerintah yang telah secara kooperatif, bersungguh-sungguh, dan bekerja keras dalam pelaksanaan pembahasan RUU tersebut di atas. Selanjutnya kepada Setjen DPR RI, khususnya Sekretariat Komisi I DPR RI dan kalangan Pers, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Sekian dan terima kasih
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PIMPINAN KOMISI I DPR RI
KETUA,

ttd

MEUTYA VIADA HAFID
A-267